

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN SELAYAR

Fina Diana*)

Nurmiati)**

Nur Hadiwijaya*)**

Universitas Patria Artha, Jl. Tun Abdul Razak

Email: Fina71diana@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the effect of human resources, information technology, and financial supervision of the financial reporting information of the Regional Government of Selayar Islands Regency. The analytical method used in this research is quantitative analysis method, that is analysis using numbers and statistic calculation to analyze a hypothesis and need some analysis tool that is: (1. Validas and reability of research data, 2. Multiple regression analysis). The result of the research found that Human Resource and Financial Supervision have positive and significant influence to Local Government Financial Reporting of Selayar Islands Regency. While Information Technology has no effect on Financial Deposit with Rule of Regression Squared (R²) is 0,923, this means 92,3% change variation of all variables can be explained simultaneously by human resource variable and financial control. The rest of 7.7% is determined by variables or other factors from outside the model.

Keywords: Financial Reporting, Human Resources, Information Technology, Financial Control

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan sebuah masalah ekonomi yang sampai saat ini belum bisa diperbaiki sedemikian baiknya. Akibatnya kehangatan perbincangan mengenai masalah tersebut telah sampai pada tahap yang semakin solid untuk menemukan titik penyelesaiannya. Sebab hal ini menjadi semakin rumit karena banyaknya kasus yang bermunculan mengenai kualitas laporan keuangan dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta.

Terjadinya sebuah kepentingan tertentu, sehingga dalam permasalahan pelaporan keuangan sering terjadi berbagai penyelewangan diantara pelaku keuangan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pemerintah sebagai pemberi kewenangan dan para pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan,

melaporkan bahkan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemerintah (Marda, 2003).

Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak (Indra, 2016).

Sebagai bukti bahwa pelaporan keuangan sangat perlu dilakukan secara terang-terangan akan berdampak pada peningkatan status daerah menjadi lebih

baik di mata pemerintah ataupun masyarakat. Hasilnya pun sangat mengejutkan bahwa kepada daerah yang memiliki status pelaporan keuangan yang baik tentunya akan mendapatkan predikat daerah yang terbaik dari pemerintah pusat. Alasannya cukup masuk akal sebab daerah yang telah mengantongi pelaporan keuangan yang baik akan selalu dijadikan sebagai daerah percontohan dengan pelaporan yang baik pula.

Sumberdaya manusia adalah salah satu variabel yang paling berpengaruh terhadap pencapaian pelaporan keuangan secara handal. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebab baik tidaknya pelaporan keuangan tergantung dari sumberdaya manusianya. Patokan awal ini merupakan segala bentuk perhatian pemerintah bahwa sumberdaya yang handal adalah asset tersendiri bagi daerah dalam mencapai proses kinerja daerah. Sehingga Zetra (2009) membenarkan hal tersebut bahwa sumberdaya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan cita-cita sebuah daerah.

Variabel lain yang mampu mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah teknologi informasi. Sehingga Sutabri (2012) menjelaskan bahwa kualitas informasi sangat dipengaruhi yaitu akurat, tepat waktu dan relevan. Sebab secara empiris teknologi informasi merupakan sarana untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan organisasi. Dalam hal ini teknologi sebuah potensi yang mampu menunjang kinerja, karena banyak pengambil keputusan hanya menginvestasikan dana untuk teknologi informasi.

Selanjutnya adalah variabel pengawasan keuangan dimana variabel ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan pelaporan sebab adanya pengawasan terhadap keuangan tentunya akan berdampak positif terhadap pengelolaan pelaporan keuangan. Untuk itu adanya pengawasan

akan berdampak pada tepatnya waktu yang disediakan untuk informasi keuangan yang sehat. Ketepatan waktu yang dimiliki merupakan salah satu cara dalam mengembangkan terciptanya suasana pelaporan keuangan yang baik.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Teori

Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Masalah keagenan efektifitas cenderung memaksimalkan *self interest* yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajarnya dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa kinerja yang mereka miliki selama ini telah baik. Teori keagenan juga menyatakan bahwa keagenan juga bersikap optimis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditujukan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi mereka juga mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sebagai agen yang akan menghindari resiko berupa, ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja yang mereka miliki. Dengan demikian pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja yang mereka miliki selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. SKPD membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyajikan suatu informasi laporan keuangan daerah

yaitu dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi yang bisa menyusun laporan keuangan. Menurut pengertian diatas bahwa sumber daya manusia merupakan suatu individu atau lebih yang berperang penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai unsur utama dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Dengan demikian, Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai pembantu atau sekaligus penanggung jawab atas pekerjaan yang ditujukan.

Untuk mencapai SDM yang berkualitas maka dibutuhkan pengembangan SDM, dimana pengembangan SDM mempunyai ruang lingkup yang luas dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) keterampilan (*skills*), kemampuan (*ability*), serta sikap/tingkah laku (*attitude*) karyawan. Pengembangan karyawan, menunjukkan kepada *learning opportunities* yang didesain guna membentuk pengembangan para karyawan.

Berkaitan dengan memberdayakan pegawai (*empowering the worker*) tersebut, berarti memungkinkan pegawai untuk mencapai kemampuan prestasi tertinggi. Proses pemberdayaan pegawai dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pegawai untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberdayaan pegawai dapat dilakukan melalui perekrutan terhadap orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan memedulikan apa yang mereka kerjakan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supono (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan adanya tingkat integrasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat dibagi beberapa bagian yaitu:

- a. Pengelolaan data dan informasi, proses kerja secara elektronik dan system manajemen.

- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat luas dan dapat dicerna dengan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya a) pengelolaan data, pengelolaan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik dan b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (Hamza,2009 dalam Yulia,2015:22).

Pada Permendagri No.59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa system akuntansi pemerintah daerah meliputi beberapa prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi computer. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi juga berperang penting dalam mengakses laporan keuangan, dalam hal ini, teknologi dapat digunakan sebagai alat pembantu sumber daya manusia agar dengan mudah membantu pekerjaan dan mudah dalam mengakses suatu laporan keuangan suatu organisasi. Penggunaan teknologi dalam hal ini bertujuan sebagai alat pengolah data sesuai dengan fungsinya.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab mengelola organisasi atas pelaporan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan adanya kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan pengabdian terhadap pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pemerintah dan terwujudnya transparansi. Tujuan pelaporan pemerintah daerah adalah sebagai alat untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntansi public dan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai alat pengendalian kinerja organisasi.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Apabila sumber daya manusia yang melakukan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang di syaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Informasi yang dihasilkan akan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya yaitu keandalan dalam melakukan pelaporan keuangan. Selain itu sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Keterlambatan penyajian keuangan berarti laporan keuangan belum atau tidak memenuhi informasi yang telah ditentukan, yaitu ketepatanwaktu.

H₁ :Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktu.

H₂ :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana dengan adanya suatu pengawasan pelaporan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pejabat tinggi daerah seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat maka pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi pelaporan keuangan daerah dengan tepat waktu (*on time*).

Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan

pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu.

H₃: Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

METODE PENELITIAN

Jumlah populasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu, tenaga kerja PNS sebanyak 61 orang dan tenaga kerja honorer sebanyak 49 orang, maka semua jumlah populasi dalam BPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 110 orang. Sehingga semua jumlah populasi dijadikan sampel.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda dengan tiga variabel bebas yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

Y = Nilai Informasi

X₁ = Sumberdaya Manusia

X₂ = Penguasaan Teknologi

X₃ = Pengawasan keuangan

ϵ = Standar Error

PEMBAHASAN

Analisis regresi dilakukan karena untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara Simultan maupun secara Parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian disajikan dalam Rekapitulasi hasil analisis regresi berganda sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Data Regresi

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig
Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,318	4,968	0,000
Teknologi Informasi(X ₂)	0,013	0,219	0,827
Pengawasan Keuangan (X ₃)	0,632	9,601	0,000
Konstanta	= 0,407		
R	= 0,961		
R square	= 0,923		
Adjusted R Square	= 0,921		
F _{hitung}	= 380,630		
Signifikansi F	= 0,000		

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,407 + 0,318x_1 + 0,013x_2 + 0,632x_3$$

Sumber Daya Manusia

Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (β_1) sebesar 0,318% terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti dapat

dikatakan bahwa variabel sumberdaya manusia (X₁) berpengaruh dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Koefisien regresi (β_1) sebesar 0,318 menyatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan yang dialami oleh sumberdaya manusianya sebuah instansi atau daerah (X₁) maka akan menambah atau meningkatkan kinerja pelaporan keuangan sebesar 0,318%.

Teknologi Infomasi

Sebagaimana analisis regresi yang dilakukan maka hasil menunjukkan koefisien regresi (β_2) sebesar 0,013% terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan signifikansi 0,827. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa variabel teknologi informasi (X_2) berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga adanya koefisien regresi (β_2) sebesar 0,013% dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan yang dialami oleh tingkat teknologi (X_2) maka akan menambah kinerja pelaporan keuangan sebesar 0,318%.

Pengawasan Keuangan

Analisis Regresi menunjukkan koefisien regresi (β_3) sebesar 0,632% terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tingkat signifikansi yang diperoleh 0,000. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu dengan adanya besaran koefisien regresi (β_3) yang diperoleh maka dapat dikatakan dengan nilai sebesar 0,632% dapat pula dikatakan bahwa setiap penambahan atau peningkatan yang dialami oleh pengawasan keuangan sebuah instansi atau daerah (X_3) maka akan menambah atau meningkatkan kinerja pelaporan keuangan sebesar 0,632%.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga sumberdaya manusia (x_1), teknologi informasi (x_2), dan pengawasan keuangan (x_3) berpengaruh secara simultan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Hasil uji simultan dalam regresi yang telah dilakukan bahwa variabel sumberdaya manusia (x_1), teknologi informasi (x_2), dan pengawasan keuangan (x_3) terhadap pelaporan keuangan (Y) secara simultan/bersama-sama menunjukkan

hasil nilai F_{hitung} adalah sebesar 380,630 dengan standar Signifikan F sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua Variabel Bebas yaitu variabel sumberdaya manusia (x_1), teknologi informasi (x_2), dan pengawasan keuangan (x_3) terhadap pelaporan keuangan (Y).

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan perhitungan statistik yang dilakukan sebelumnya maka ditemukan hasil bahwa sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil ini menempatkan tingkat signifikansi sumberdaya manusia lebih kecil pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan apabila dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Sumberdaya manusia pada suatu pemerintahan sangat berperan aktif dalam meningkatkan proses perkembangan suatu daerah. Mengingat bahwa dengan adanya power sumberdaya manusia akan memunculkan berbagai ide dalam meningkatkan kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah. Olehnya itu keberadaan sumberdaya manusia yang mampu menjual kemajuan daerah sehingga mampu menarik perhatian banyak pihak untuk bekerjasama dalam memajukan daerah.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan variabel sumberdaya manusia sebagai salah satu variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan baiknya pelaporan keuangan bagi daerah sudah tepat karena sumberdaya manusia adalah penggerak bagi berjalannya sebuah kegiatan. Sumberdaya manusia dapat dipertahankan untuk dijadikan sebagai acuan yang tetap dalam melihat perkembangan pelaporan keuangan bagi setiap daerah sehingga langkah kedepannya yang perlu dilakukan adalah

proses pelatihan bagi sumberdaya manusia wajib untuk dilakukan.

Teknologi Informasi

Melihat hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan hasil regresi sebesar 0,827% dimana apabila dibandingkan dengan standar signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05%, maka dapat dinyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dibandingkan dengan standar signifikansi yang telah ditetapkan.

Walaupun teknologi informasi merupakan sebuah media yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan dalam sebuah instansi di daerah akan tetapi tidak semua daerah mampu menjalankan teknologi. Salah satu alasan mengapa teknologi informasi berpengaruh tapi tidak signifikan dalam penelitian ini adalah karena tidak semua sumberdaya manusia yang dimiliki mampu mengerti bahasa teknologi. Kemudian diantara 110 orang sumberdaya manusia yang diwawancarai dapat dikatakan 80% sudah ingin dipensiunkan sehingga pemerintah setempat sudah sewajarnya melakukan pergantian demi mewujudkan kinerja pelaporan keuangan yang sedemikian baiknya.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan variabel teknologi informasi harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sangat sesuai sehingga perlu dipertahankan. Sebab informasi merupakan salah satu pedoman akuntan dalam perkantoran yang wajib untuk digunakan baik pusat ataupun daerah-daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengawasan Keuangan

Sebagaimana hasil perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya maka ditemukan hasil bahwa pengawasan

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh sebesar 0,000% sehingga apabila dibandingkan dengan standar signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05%, maka dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil bila dibandingkan dengan taraf signifikansi.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Mardiasmo (2006) bahwa sistem dalam sebuah instansi ataupun perkantoran akan berjalan dengan baik apabila adanya pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Sehingga diperlukan adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Disamping adanya teori yang mendukung, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrick Femanda (2008) yang dilakukan di Kota Payakumbuh, Sumatera Utara. Sebuah pengawasan dapat dilakukan dengan baik karena salah satu cara untuk menstabilkan sebuah pelaporan keuangan yang bernilai baik di mata pemerintah maupun masyarakat. Apalagi banyak kasus yang menjerat lapisan perangkat pemerintah yang tidak mampu melaporkan keuangannya dengan baik.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan variabel pengawasan keuangan sudah sesuai dan perlu dipertahankan untuk dikembangkan dikemudian hari. sebab pengawasan sangat perlu dilakukan karena mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pelaporan keuangan akan mencederai sebuah sistem dalam sebuah instansi. Sehingga pengawasan keuangan akan bernilai positif bagi keberlangsungan kinerja instansi di setiap daerah terutama Kabupaten Kepulauan Selayar.

PENUTUP

Dengan melihat hasil yang telah dicapai dan ditemukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut ini : Sumberdaya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan di daerah dan merupakan sebuah variabel yang dapat dipertahankan dengan baik untuk pengelolaan keuangan.

Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan akan tetapi merupakan sebuah variabel yang dapat meningkatkan efektivitas keuangan di setiap daerah

Pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di daerah dan merupakan variabel yang selalu menjadi tolak ukur yang utama dalam meningkatkan efektivitas keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Atmadja, dkk. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*, (online), Volume 3 No. 1, <http://ejournal.undiksha.ac.id>, (diakses 16 mei 2017)
- Diawati, Muslikha. 2015.. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan keuangan daerah pemerintahan, *Skripsi*, (Online). Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/37192/15/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. (diakses 16 mei 2017)
- Fernanda. H. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Suatu Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh). *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Tajagrafindo Persada
- Mamout CP, S.2003. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan TRansparansi dan Akuntabilitas (studi pada Kabupaten Minahasa Tenggara) *Jurnal EMBA Vol. 4 No 1*. Maret 2016, 1519-1530
- Marda G,S. 2003. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi,1995, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Septiani, Demonti. 2015. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi

- Informasi (Studi Empiris Pada Dppkad Pemerintah Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Surakarta), *Skripsi*. (online). Surakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. [http://eprints.ums.ac.id/41752/1/NASKAH%20PUBLIK ASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/41752/1/NASKAH%20PUBLIK%20ASI.pdf). (diakses 15 mei 2017)
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zetra.2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Universitas Gaja Mada Yogyakarta*
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Unuversitas Muria. Kudus